PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN KESEHATAN**

UNIT KERJA : **DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUNG BUDIJONO**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **272207**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 2.935.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m2/165 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.250 m2/317 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 13.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT BEBEK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, UWINFLY SEPEDA LISTRIK Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. 54.500.000**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 35.736.029**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**3.038.236.029**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**267.634.289**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**2.770.601.740**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.